



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telp. 021- 8091908 Faks. 021-8002265/8011753

Website [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

Nomor : PHN.HN.04.03-13 8 Februari 2023  
Lampiran : 1 eksemplar  
Perihal : Telah Dibukanya Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/  
Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan Penghargaan *Anubhawa Sasana  
Desa Jagaddhita*

**Yth. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia  
di tempat**

Paralegal merupakan komponen penting dan garda terdepan dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Penguatan peran paralegal dapat dilakukan dengan merekrut aktor-aktor penting di masyarakat untuk menjadi Paralegal di wilayahnya masing-masing. Kepala Desa/Lurah merupakan aktor kuat yang mengakar dan dekat dengan masyarakat yang dapat menjalankan peran paralegal dengan sangat baik. Kehadiran Kepala Desa dapat menjadi *Non Litigation Peacemaker* yang berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Juru Damai yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul di Desa, sehingga penyelesaian tersebut tidak harus berlanjut ke pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI telah membuka seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* sebagai bentuk apresiasi terhadap Kepala Desa yang telah berperan menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan dan mencalonkan Kepala Desa/Lurah yang dianggap mampu dan telah berperan sebagai *Non Litigation Peacemaker* dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/Lurah dibuktikan dengan SK;
2. Kartu Tanda Penduduk yang di-*scan* dan diunggah pada link;
3. Foto 4x6 dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah *background* putih;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Bukti pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berbentuk:
  - a. cerita pengalaman singkat maksimal 2 halaman;
  - b. video dokumentasi kerja (durasi maksimal 2 menit);
  - c. link berita/media massa; dan/atau
  - d. dokumen bukti bentuk lainnya;
6. Surat Perintah/Surat Tugas; dan
7. Melakukan pendaftaran pada Link: <https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>

Penganugerahan *Paralegal Justice Award* tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan *Paralegal Academy*, yang selanjutnya diberikan pula penghargaan bagi desa/kelurahan yang mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja bagi masyarakatnya dengan Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Prof. Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP 197105011993031001**

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; dan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Lampiran I Kepala BPHN  
Nomor : PHN-HN.04.03-13  
Tanggal : 8 Februari 2023

**Anugerah *Paralegal Justice Award***  
**bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan**  
**Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita***

**I. Ketentuan Umum**

1. Peserta Anugerah Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* adalah Kepala Desa/Lurah yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah;
2. Kepala Desa/Lurah yang memenuhi ketentuan sebagai *Non Litigation Peacemaker* mengikuti pendidikan dan pelatihan *Paralegal Desa* melalui *Paralegal Academy* selama 3 (tiga) hari.

**II. Persyaratan**

**A. *Paralegal Academy***

1. Masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/Lurah dibuktikan dengan SK
2. Kartu Tanda Penduduk yang di-*scan* dan diunggah pada link
3. Foto 4x6 dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah *background* putih
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Bukti pengalaman Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berbentuk :
  - a. cerita pengalaman singkat maksimal 2 halaman;
  - b. video dokumentasi kerja (durasi maksimal 2 menit);
  - c. link berita/media massa;
  - d. dokumen bukti bentuk lainnya;
  - e. Surat Perintah/Surat Tugas.

**B. *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita***

1. Memenuhi syarat pada huruf A
2. Merupakan Desa Sadar Hukum/Calon Desa Sadar Hukum
3. Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat
4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum
5. Dokumentasi penyelesaian permasalahan/sengketa di luar proses hukum oleh lembaga/tokoh masyarakat desa
6. Dokumentasi hasil kerja terkait upaya kelayakan investasi, peningkatan sector pariwisata dan pembukaan lapangan kerja
7. Surat Pernyataan calon penerima Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* yang tidak tersangkut kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya.

**III. Waktu Pelaksanaan**

1. Pengumuman dan pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal 10 Februari s.d. 8 Maret 2023
2. Seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Maret 2023
3. Audisi peserta dilaksanakan pada tanggal 27 Maret s.d. 14 April 2023
4. Pengumuman hasil audisi pada tanggal 5 Mei 2023
5. *Paralegal Academy* pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2023 dilaksanakan di Jakarta (seluruh peserta mendapatkan sertifikat *Paralegal Desa*)
6. Eliminasi *Paralegal Academy* pada tanggal 31 Mei 2023 :
  - a. Lulusan terbaik *Paralegal Academy* akan mendapatkan penghargaan Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dengan gelar (NLP)
  - b. Desa/Kelurahan akan mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*
7. ***Paralegal Justice Award*** akan diberikan bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang juga mendapatkan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*, pada tanggal 1 Juni 2023 malam Hari Lahir Pancasila.

*\*Panitia dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan*

**IV. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui link <https://bit.ly/ParalegalJusticeAward> menggunakan email aktif;

2. Calon peserta mengunggah seluruh berkas yang dipersyaratkan dalam link pendaftaran (apabila diperlukan peserta melakukan kompres *file* untuk memperkecil ukuran *file*, karena panitia akan membatasi besaran *file* yang diunggah).

## V. Tahapan Seleksi

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan berkas pendaftaran yang dipersyaratkan;
- b. Panitia akan melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang telah diunggah oleh pendaftar;
- c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).

### 2. Audisi Peserta

- a. Audisi dilakukan terhadap peserta yang telah lulus seleksi administrasi;
- b. Audisi peserta dilakukan oleh Dewan Juri, dengan melihat dan menyeleksi bukti pengalaman pendaftar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berupa cerita singkat, video, link berita/media massa, atau bukti bentuk lainnya yang disampaikan pendaftar;
- c. Dewan Juri dalam menentukan kelulusan peserta, dapat melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada pihak tertentu terhadap bukti pengalaman yang disampaikan pendaftar;
- d. Hasil Audisi Peserta akan diumumkan oleh panitia pada laman [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).

## VI. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan yang dipersyaratkan;
2. Kelulusan seleksi Audisi Peserta didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman pendaftar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa;
3. Eliminasi *Paralegal Academy* lulusan terbaik akan mendapatkan penghargaan Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker*, didasarkan pada aspek kedisiplinan mengikuti *Paralegal Academy* dan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*, yang selanjutnya dilakukan presentasi kompetensi dan eksistensi dari seluruh peserta;
4. Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan yang dipersyaratkan;
5. ***Paralegal Justice Award*** didasarkan pada Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang juga mendapatkan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*;
6. Keputusan Dewan Juri bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

## VII. Penganggaran

1. Biaya konsumsi peserta selama kegiatan (paket *meeting*) bagi peserta *Paralegal Academy* lulus seleksi dan audisi ditanggung oleh Panitia;
2. Biaya transportasi dan akomodasi dibebankan kepada peserta (Kepala Desa/Lurah).

## VIII. Narahubung

1. Dorma Elvrianty Sirait : 0821-6817-8530
2. Susan Widhiyastuti : 0822-2022-5605

Lampiran II Kepala BPHN  
Nomor : PHN.HN.04.03-13  
Tanggal : 8 Februari 2023

LOGO  
INSTANSI

NAMA INSTANSI

FORMAT SURAT LURAH / KEPALA  
DESA / PEJABAT SETINGKAT

Jalan .....  
Telepon .....Faksimili .....  
Laman : ....., Email : .....

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa selama menjalankan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pemangku jabatan dalam hal ini perangkat pemerintah pada Desa/Kelurahan yang diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tematik tidak terlibat permasalahan hukum dengan kategori *Extra Ordinary Crime* yaitu:

1. Korupsi;
2. Terorisme;
3. Narkotika;
4. dan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi syarat penerima penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian perihal di atas maka penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* yang diberikan kepada perangkat pemerintah selaku pemangku jabatan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nama tempat, tanggal  
Nama jabatan pembuat pernyataan

TTD & STEMPEL

Nama lengkap

Lampiran III Kepala BPHN  
Nomor : PHN.HN.04.03-13  
Tanggal : 8 Februari 2023

### Pengumuman *Paralegal Justice Award*



#### **Persyaratan:**

- ✓ SK Kepala Desa/Lurah
- ✓ KTP
- ✓ Daftar Riwayat Hidup
- ✓ Foto
- ✓ Surat Perintah/Tugas
- ✓ Video Praktik Penyelesaian Konflik

#### **Reward:**

- Pendidikan Paralegal Desa
- Sertifikat Paralegal Desa
- Piagam *Non Litigation Peacemaker* dan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*
- Piala Anugerah ***Paralegal Justice Award***

#### **DAFTAR SEKARANG!**

<https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>



#### **Batas Pendaftaran**

**8 Maret 2023**



Informasi Selengkapnya di:

**[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)**

Contact Person

**0821-6817-8530 (Dorma)**  
**0822-2022-5605 (Susan)**

